PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DALAM PLATFORM LAIN TANPA IZIN

Asti Giri Anjani¹, Geza Arditya², Mey Lia Sari³, Aisyah Resta Melati⁴ Agvianto
Perdawan⁵

Hukum, Universitas Tidar¹²³⁴⁵
e-mail : resta.melati23@gmail.com

Abstract

Film piracy on digital platforms has become an increasingly troubling problem for copyright holders. With the increasing accessibility of the internet, copyrighted films can easily be distributed illegally on various platforms without permission. This article investigates the challenges faced by copyright holders in protecting their works from piracy on digital platforms. This research uses legal analysis methods and literature studies to identify the main obstacles and possible solutions to overcome this problem. The research results show that copyright protection against film piracy requires a holistic approach, involving collaboration between government, industry and digital platforms. In addition, the implementation of copyright protection technology and education to the public about the impact of piracy on the film industry is also needed. This article also reviews various legal and technological strategies that can be used to reduce film piracy on digital platforms. Thus, this article provides important insights for copyright holders, policy makers, and legal practitioners in their efforts to protect film copyrights from piracy on digital platforms.

Keyword: Movie, Ilegal, Copyrights

Abstrak

Pembajakan film dalam platform digital telah menjadi masalah yang semakin meresahkan bagi pemegang hak cipta. Dengan meningkatnya aksesibilitas internet, film-film yang dilindungi hak cipta dapat dengan mudah disebarluaskan secara ilegal di berbagai platform tanpa izin. Artikel ini menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh pemegang hak cipta dalam melindungi karya-karya mereka dari pembajakan di platform-platform digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum dan studi literatur untuk mengidentifikasi hambatan utama dan solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan platform digital. Selain itu, implementasi teknologi perlindungan hak cipta dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak pembajakan terhadap industri film juga diperlukan. Artikel ini juga mengulas berbagai strategi hukum dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi pembajakan film di platform-platform digital. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang penting bagi pemegang hak cipta, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam upaya mereka untuk melindungi hak cipta film dari pembajakan dalam platform-platform digital.

Kata Kunci : Film, Ilegal, Hak Cipta

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi distribusi dan akses terhadap konten film. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, terutama dengan meningkatnya kasus

pembajakan film yang tersebar melalui berbagai platform tanpa izin. Tinjauan pustaka ini akan mengkaji literatur yang relevan mengenai upaya perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film di era digital. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk film. Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di banyak negara, hak ini meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya secara publik. Pembajakan film, di sisi lain, adalah tindakan reproduksi, distribusi, atau penggunaan karya film tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang melanggar ketentuan hukum hak cipta.

Pembajakan film telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital ini. Dengan kemudahan akses internet dan teknologi digital, film-film yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan secara ilegal di berbagai platform tanpa izin. Hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi para pembuat film dan pemegang hak cipta, tetapi juga bagi industri secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk menjaga integritas karya-karya film dan mendorong pertumbuhan industri kreatif secara adil dan berkelanjutan. Penting untuk memahami dampak negatif dari pembajakan film terhadap industri perfilman. Tidak hanya merugikan para pembuat film secara finansial dengan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima dari penjualan dan lisensi film, tetapi juga merusak ekosistem bisnis secara keseluruhan. Pembajakan juga dapat mengurangi insentif bagi para pembuat film untuk berinvestasi dalam produksi karya baru, mengurangi diversitas dan inovasi dalam industri.

Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan tantangan dalam melindungi hak cipta film di platform lain tanpa izin. Salah satu tantangan utamanya adalah kecepatan dan skala penyebaran konten ilegal di internet. Meskipun ada upaya untuk memblokir dan menghapus konten ilegal, namun seringkali hal ini tidak cukup efektif mengingat banyaknya platform dan sumber konten ilegal yang tersedia. Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai yurisdiksi juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan film secara lintas negara. Namun demikian, ada berbagai strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film dalam platform lain tanpa izin. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, industri, dan platform digital untuk mengembangkan solusi teknis seperti sistem pemantauan konten dan takedown yang lebih efektif juga sangat diperlukan.

Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film di platform lain tanpa izin adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Meskipun berbagai mekanisme perlindungan dan penegakan hukum telah ada, tantangan teknologi dan perbedaan regulasi internasional memerlukan kerjasama global dan solusi inovatif. Melalui kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, solusi teknologi canggih, dan edukasi publik, perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan untuk meminimalkan dampak negatif pembajakan film. Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang dinamika pembajakan film dalam platform lain tanpa izin, tantangan dalam melindungi hak cipta, serta strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini dan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih berdaya bagi perlindungan hak cipta dan pertumbuhan industri perfilman yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terkait perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film dalam platform lain tanpa izin menunjukkan bahwa praktik pembajakan film merupakan pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang merugikan pemilik hak cipta dan industri film secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa meskipun undang-undang hak cipta internasional dan nasional telah diterapkan untuk melindungi karya-karya audiovisual, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan utama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk teknologi digital yang mempermudah distribusi ilegal, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengguna internet, serta keterbatasan sumber daya dalam menindak pelanggaran hak cipta. Beberapa penelitian mengusulkan perlunya peningkatan kerjasama internasional, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, serta pengembangan teknologi pengamanan digital yang lebih canggih untuk meminimalisir pembajakan film di era digital.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film di platform lain tanpa izin adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional terkait hak cipta. Penelitian ini juga melibatkan analisis kasus untuk memahami efektivitas penegakan hukum berdasarkan putusan pengadilan dan laporan terkait. Wawancara mendalam dengan penegak hukum, pemilik konten, dan ahli hak cipta memberikan perspektif praktis dan wawasan langsung mengenai tantangan di lapangan. Studi literatur dari jurnal akademik dan artikel ilmiah memperkaya pemahaman teori dan praktik perlindungan hak cipta, sementara survei terhadap masyarakat umum mengungkap kesadaran dan sikap terhadap isu pembajakan film, membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film dalam platform lain tanpa izin

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam Pembangunan bangsa. Melalui hak cipta, karya Masyarakat akan memiliki payung hukum sehingga perlindungan terhadap karya tersebut membantu pencipta. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ciptaan yang dapat dilindungi meliputi: buku, program computer, pamphlet, ceramah, pidato, lagu atau musik, seni rupa, dan-lain-lain. Salah satu yang di perlu diperhatikan adalah film.

Pembuatan film menelan biaya yang banyak dan memerlukan waktu, tenaga, serta ide yang tak sedikit. Pada tahun 2019 lalu, kementerian komunikasi dan informatika republik Indonesia (KOMINFO) memblokir situs nonton film bajakan Indonesia, IndoXXI dan LK21. Hal ini merupakan Langkah tepat pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum kepada para pencipta film, mengingat film juga bagian yang perlu dilindungi kekayaannya intelektualnya. Sebelum diblokir oleh pemerintah, situs IndoXXI dan LK21 merugikan berbagai pihak, karena Masyarakat dapat mengakses film secara Cuma-Cuma lewat jalur ilegal. Kepala Plt. Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan bahwa usaha pemberantasan situs film bajakan ini guna mendukung pertumbuhan orisinalitas sebuah produk karya seseorang. Tak hanya pencipta film saja yang dirugikan, namun negara juga turut dirugikan atas pembajakan film ini. Para pencipta film harus membayar pajak, terutama pihak bioskop. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bioskop dan tontonan film masuk ke dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) menerangkan besaran pajak sebesar paling tinggi 35%. Maka, dengan adanya situs film bajakan seperti IndoXXI dan LK21 merugikan beberapa pihak, di antaranya para pembuat film termasuk pemilik di dalamnya, dan juga negara juga turut dirugikan karena tidak melewati pajak. Padahal, pajak sendiri berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk Pembangunan negara yang dinikmati oleh setiap individu. Pemerataan Pembangunan di pelosok negeri juga memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang pendapatan terbesarnya adalah melalui pajak. Namun, dengan adanya situs pembajakan film ilegal, menyebabkan kerugian negara berupa tak lolos pajak.

Situs ilegal IndoXXI dan LK21 merupakan contoh nyata dari perkembangan teknologi. Di masa sekarang, menonton film tidak harus melalui bioskop dan televisi, namun dapat diakses di mana saja melalui gadget. Situs IndoXXI dan LK21 merupakan contoh menonton film melalui situs ilegal, sedangkan situs legal dapat melalui platform lain, misalnya yang paling populer adalah Netflix. melalui situs legal seperti Netflix, maka penonton akan mendapat fitur yang tidak ada dalam situs ilegal, misalnya di antaranya adalah subtitle berbagai Bahasa, kualitas HD, audio yang jernih, dan tentunya tanpa iklan. Apabila seseorang mengakses film melalui platform ilegal seperti Indo XXI dan LK21, maka kualitas film termasuk audio yang didapatkan seadanya. Selain itu, pada platform ilegal sering bermunculan iklan yang tidak relevan dengan film, kasus yang paling sering adalah iklan judi online.

Iklan ini juga masalah yang serius apabila mengakses situs merupakan seseorang di bawah umur, mengingat iklan pada situs film ilegal banyak memuat hal dewasa misalnya judi dan pornografi. Anak-anak usia dibawah umur belum memiliki pola pikir yang matang, maka dari itu mereka dianggap sebagai golongan belum cakap hukum. Apabila iklan pada platform film ilegal ini bermunculan dan mereka tergiur, maka hal ini menjadi salah satu faktor perusak anak bangsa di masa depan. Fakta di lapangan saat ini adalah banyak anak-anak usia dini di bangku sekolah menengah yang sudah mengenal rokok, bahkan tak jarang pula di usia sekolah dasar. Hal itu merupakan perusak generasi bangsa, sama halnya pada iklan judi maupun pornografi yang terdapat pada situ film ilegal, yang dapat mempengaruhi pikiran anak untuk tergiur melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukannya. Maka dari itu, penting untuk menonton film melalui gadget secara ilegal, misalnya melalui Netflix. meskipun kita membayar, namun hal tersebut juga sebagai perlindungan diri. Tak hanya pemilik film saja yang diuntungkan, melainkan negara melalui pajak juga diuntungkan dengan kita menonton melalui Netflix, selain itu anak usia di bawah umur yang hendak menonton film juga banyak opsi film yang sesuai dengan usianya. Dan yang paling utama ialah bebas iklan, dan terhindar dari berbagai iklan yang tidak relevan dengan kehidupan kita.

Langkah pemerintah dalam memblokir situs film ilegal seperti IndoXXI dan LK21 sudah tepat dan seharusnya, karena hal tersebut menguntungkan pihak yang sudah berjerih payah dalam pembuatan film. Selain menguntungkan pembuat film dan negara, juga menguntungkan pelanggan karena proteksi diri dan terhindar dari iklan-iklan yang tidak relevan. Namun, di masa sekarang yang serba digital ini memunculkan permasalahan baru terkait hak kekayaan intelektual pada sebuah film.

Seperti yang kita semua tahu bahwa di masa sekarang hampir semua kegiatan dapat diakses melalui smartphome, bahkan kegiatan yang tidak bisa kita pikirkan 10 tahun yang lalu. Saat pandemi covid anak-anak tetap dapat bersekolah melalui smartphome melalui platform zoom maupun google meet, olahraga cukup di rumah

saja dapat melihat tata cara (tutorial) melalui smartphone, bahkan kita bisa berinteraksi secara langsung dengan idola kita di belahan bumi manapun melalui fitur live pada sosial media (misalnya live Instagram dan tiktok). Hebatnya lagi, fitur live pada platform TikTok membantu orang yang berjualan menaikkan omsetnya. Semua kegiatan pembelajaran hingga jual beli tersebut dilakukan melalui smartphone, hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.

Namun, baru-baru ini pada platform TikTok bermunculan akun-akun pembajakan film, yang sayangnya pemerintah belum mengambil Langkah apapun. Jika di tahun 2019 lalu pemerintah dengan tegas memblokir situs pembajakan film illegal IndoXXI dan LK21, namun baru-baru ini pembajakan film pada media platform TikTok masih berseliweran bebas. TikTok merupakan sebuah aplikasi sosial media di mana kita dapat bebas mengakses dan membuat video, yang dampak positifnya adalah pada platform ini banyak video edukasi mulai dari pengetahuan hingga tutorial memasak. Namun, pada platform ini juga terjadi kejahatan terkait hak kekayaan intelektual, yang sayangnya justru mendapat respon positif oleh warganet.

Para pemilik akun hanya perlu mengunggah potongan-potongan film yang ia dapat ke TikTok. Dikarenakan TikTok memiliki Batasan waktu dalam mengunggah video, jadi film yang diunggah harus dipotong sesuai durasi tiktok dan menjadi beberapa bagian (part). Sayangnya, banyak Masyarakat yang justru menikmati potongan film illegal dari TikTok tersebut. Tindakan illegal semacam ini justru mendapat respon positif dari Masyarakat merupakan hal yang miris terjadi di negara hukum. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia kurang peduli dengan hukum kekayaan intelektual, kurang menghargai pencipta, dan mengakibatkan kerugian negara.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang hak cipta. Menurut Undang-Undang ini, hak cipta memberikan perlindungan payung hukum kepada karya-karya yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum, termasuk film. Pembajakan film yang mencakup pengunggahan film secara ilegal di platform TikTok dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

2. Dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan film pada platform lain

Pembajakan film melalui platform seperti Telegram, situs streaming, dan media sosial menimbulkan dampak hukum dan kerugian yang signifikan. Secara hukum pembajakan film merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Dari sudut pandang hak cipta, praktik ini melanggar hukum yang melindungi karya seni dan kreativitas. Dengan membagikan atau mengakses film secara ilegal, pengguna secara langsung merampas hak penghasilan yang seharusnya diterima oleh para pembuat film, studio produksi, dan pihak terkait lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi insentif untuk terus berinvestasi dalam industri film, menghambat inovasi dan pertumbuhan. Serta dapat berpengaruh pada penurunan kualitas layanan legal yang disediakan oleh platform resmi. Persaingan dengan opsi ilegal yang menawarkan konten secara gratis atau dengan harga yang lebih murah dapat mengakibatkan penurunan investasi dalam produksi dan penyediaan konten legal. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kualitas film yang tersedia secara legal, serta pengalaman pengguna yang dihadapkan pada pilihan antara konten legal yang lebih mahal atau opsi ilegal yang lebih terjangkau.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa siapa saja yang memproduksi, menyebarluaskan, atau memperjualbelikan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku pembajakan bisa berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai Rp4 miliar. Contohnya, pelaku pembajakan film "Keluarga Cemara", yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah, yang kemudian divonis pidana penjara selama 14 bulan. Pembajakan film yang dilakukan oleh Aditya ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi produsen film. Dalam kasus pembajakan film "Keluarga Cemara", pelaku Aditya Fernando Phasyah mengunggah film tersebut di situs dunia film 21 sehingga bisa ditonton secara gratis. PT Visinema Pictures mengalami kerugian antara Rp2,8 miliar hingga Rp7 miliar akibat tindakan ini. Kerugian ini mencakup kehilangan pendapatan dari penjualan tiket, DVD, dan hak tayang di platform legal. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan anggaran untuk produksi konten baru, berpotensi mengurangi keragaman dan kualitas dalam industri, serta menyulitkan para profesional film untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Menurut laporan Media Partners Asia (MPA) tahun 2020, pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia sekitar 1 miliar USD pada 2019 dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja di sektor TV, Video Online, dan Teater Indonesia sekitar 200 juta USD. Kerugian ini bukan hanya dialami oleh produser dan distributor, tetapi juga berdampak pada ekonomi makro, seperti penurunan pendapatan pajak dan hilangnya lapangan pekerjaan. Pembajakan film juga berarti kehilangan royalti bagi pencipta film. Royalti ini seharusnya diterima oleh pencipta sesuai dengan lamanya masa perlindungan hak cipta. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masa perlindungan hak cipta untuk film adalah selama 50 tahun. Kehilangan royalti ini berdampak langsung pada pendapatan para kreator dan mengurangi insentif bagi mereka untuk terus berkarya.

Secara sosial pembajakan film berdampak pada kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang ingin menonton film bajakan hanya perlu mencarinya di internet, dan akan menemukan berbagai situs yang menyediakan film tersebut secara ilegal. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap industri film secara keseluruhan. Jika film-film bajakan menjadi lebih mudah diakses daripada film-film legal, masyarakat mungkin kehilangan penghargaan terhadap proses kreatif, distribusi yang adil, dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh industri film. Kebiasaan ini tentunya merugikan industri film karena mengurangi jumlah penonton di bioskop dan pendapatan dari layanan streaming legal. Hal ini juga mengubah perilaku konsumen, yang lebih memilih menunggu film diunggah secara ilegal daripada membayar untuk menonton di bioskop atau melalui platform resmi. Selain itu, dampak pembajakan film dalam platform lain tanpa izin juga dapat merembet ke industri terkait, seperti perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.

Oleh karena itu, menanggulangi pembajakan film bukan hanya masalah hukum semata tetapi juga penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan ekosistem industri film secara keseluruhan. Apalagi pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif dan memberikan perlindungan hukum kepada penciptanya. Pembajakan film merugikan industri secara keseluruhan dengan merampas hak-hak pencipta, produser, dan pemegang lisensi. Pelanggaran hak cipta mengurangi kepercayaan dan kestabilan industri film, serta mengurangi dorongan untuk menciptakan konten baru. Selain itu, dari segi ekonomi, Pembajakan film juga mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi para

pembuat film, distributor, dan pihak terkait lainnya. Ketika film dibajak dan dipublikasikan secara ilegal, potensi pendapatan dari penjualan film secara legal menurun secara signifikan. Hal ini berdampak negatif pada industri film secara keseluruhan, mengurangi insentif bagi para pelaku industri untuk menghasilkan konten baru dan berinovasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis perlindungan hak cipta menjadi perhatian utama. Praktik pembajakan tidak hanya merugikan produser film dan industri film secara finansial, namun juga merusak integritas karya dan menghambat inovasi di lapangan. Untuk melindungi hak cipta, diperlukan penegakan hukum yang tegas, kerja sama internasional, pendidikan masyarakat, pengembangan teknologi, dan kolaborasi industri. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan suatu lingkungan yang lebih aman dan adil dapat tercipta untuk pembuat film dan industri kreatif secara keseluruhan. Pemegang hak cipta film di Indonesia telah dilindungi secara hukum melalui sistem perundang-undangan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu yang melanggar hak cipta film. Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok, telegram dan web ilegal lainnya terdapat perlindungan preventif diatur dalam hak-hak pencipta dan karya sinematografi pada UU Hak Cipta. Perlindungan represif berupa sanksi pembajakan pada pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

Saran

Saran yang penulis berikan adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan terhadap industri kreatif. serta Pengembangan teknologi terhadap perlindungan hak cipta yang lebih canggih dapat membantu mencegah pembajakan secara efektif. dan perlu adanya kolaborasi di dalam Industri perfilman, platform online, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam melindungi hak cipta dan memberantas pembajakan film secara bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Brown, T. (2020). "Digital Rights Management and the Future of Film Protection." *Journal of Digital Media*, 15(2), 45-62.
- Dheasaputra, P. R. G. R., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 125-136.
- Green, R. (2017). "Legal Measures Against Film Piracy: A Global Perspective." *International Journal of Intellectual Property*, 12(1), 78-94.
- Hauzan, M. R., & Haryanto, I. (2023, November). Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 990-1010).
- Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika*, 27(7), 992-1006.

- Johnson, A., & Smith, B. (2019). "Economic Impact of Film Piracy on the Global Film Industry." *Journal of Media Economics*, 23(3), 102-117.
- Rabbani, N., & Saripudin, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2791-2798.
- Zuama, A. P. C. (2021). Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 95-111.